



PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 9 / DPRK / 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan, penyusunan dan pembentukan Qanun - Qanun Kabupaten Aceh Besar agar terencana, terpadu, sistematis dan tidak tumpang tindih, harus dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah Kabupaten Aceh Besar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka hasil penyusunan Program Legislasi Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang disepakati menjadi Program Legislasi Daerah Kabupaten Aceh Besar ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang... 4

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
1. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Besar Hari Senin, Tanggal 2 November 2020 tentang Penjadwalan Rapat Paripurna Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021 dan Penjadwalan Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang APBK Aceh Besar Tahun Anggaran 2021.
 2. Hasil Keputusan Badan Legislasi DPRK Aceh Besar dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar dan Bagian Hukum Setdakab Aceh Besar Hari Senin Tanggal 23 November 2020 tentang Finalisasi Penetapan Program Legislasi Daerah Tahun 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dapat menyetujui penetapan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada Tanggal 24 November 2020 M
8 Rabiul Akhir 1442 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR

WAKIL KETUA,

ZULFIKAR AZIZ, SE

WAKIL KETUA,

BAKHTIAR, ST

KETUA,

ISKANDAR ALI, S. Pd, M. Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR : 9/DPRK/2020
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2020 M
8 RABIUL AKHIR 1442 H

PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021

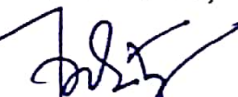
NO	NAMA RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021
1.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pembangunan Gedung.
2.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Kabupaten Aceh Besar.
4.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah seulawah Raya.
5.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh.
6.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2039.
7.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan Dan Waralaba.
8.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pengelolaan Sampah.
9.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Kepemudaan Aceh Besar.
10.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2034.
11.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Protokol Kesehatan Untuk Adaptasi Kabiasaan Baru Masyarakat (New Normal) Pasca Pandemi Corona Virus Disease 2019.
12.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Aceh Besar pada Perseroan Terbatas Bank Aceh.
13.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat.
14.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pembentukan Mukim Ie Alang Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar.
15.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Ketahanan Keluarga.
16.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 - 2032.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR


WAKIL KETUA,


ZULFIKAR AZIZ, SE

WAKIL KATUA,


BAKHTIAR, ST

KETUA,


ISKANDAR ALI, S. Pd, M.Si